

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Raih Asa Sukses.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Ahmad Mukti Fajra ND dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

C.S.T Kansil, Christine, dan kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

H. Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenamedia Group, Jakarta.

Jamaluddin, 2015, *Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Lhoksemauwe, Unimalpress.

J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan (hak hak jaminan kebendaan)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Joko Sriwidodo dan Tumanggor, 2024, *Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press

H.M.N. Purwosutjipto, 2008, *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan.

Muhammad Syarif, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sumatera Barat, Get Press Indonesia.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur, Qiara Media.

P.N.H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana.

- R. Simanjuntak, 2005, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum.
- R. Subekti, 2002, *Pokok-Pokok hukum perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Salim, HS, 2003 *Perkembangan Hukum kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Tinggi.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, 2024, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*, Medan, Media Penerbit Indonesia.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Zainal Asikin, 2003, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 8/Pdt.Sus.Pailit/2024/Pn Niaga Mdn.

C. Skripsi/ Jurnal

- Andyta Linda Aristy dan Paltiada Saragi, 2024, “Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat *Force Majeure* oleh debitur”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 4.
- Anjeli Ratuwala, 2024, “Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perseroan akibat Wanprestasi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhoksemauwe.

- Ari Arsitaningrum, 2023, "Urgensi Lembaga Insolvensi Test atas Perkara Kepailitan Di Indonesia Berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Anita, 2024, "Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Syariah dan Ilmu Hukum Islam Intitut Agama Islam Negeri. Brian Khukuh Wijaya, 2016, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Anak yang Berkonflik dengan Hukum", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 05, No. 04.
- Brian Khukuh Wijaya, 2016, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Anak yang Berkonflik dengan Hukum", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 05, No. 04.
- Christian Asyer Matutina, 2024, "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Investor akibat Pailitnya Perseroan Terbatas Terbuka", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
- Charina Putri Besila, 2021, "Urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvensi Test dalam Penetapan Status Pailit di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta.
- Clara Renny Kartika, 2020, "Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dalam Kepailitan oleh Kurator", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jawa Timur.
<https://share.google/Ty8HiJx7wwkbUG9pE>.
- Diana Surjanto, 2018, "Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Vol, 3, No. 2, *Jurnal Hukum Kenotariatan*.
- Dina Fazriah, 2023, "Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada saat Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*", Vol 1, No.2.
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/304>.
- Isis Ikhwansyah dan Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, 2019, "The Implementation of Insolvency Test on debtors", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Izni Nur Izzati, 2020, "Analisis Yuridis Keadaan Insolvensi Debitor Pailit PT. Mandala Airlines berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Permbayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN. NIAGA. JKT. PST)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

- I Wayan Banden, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, 2020, “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang”, *Jurnal Read Kertha*, Vol. 3, No. 1.
<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/7858>.
- Khairini Fadhila, 2018, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Semen antara PT. Semen Padang dengan PT. INDOBARUNA BULK Transport Menggunakan Kapal Laut”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Lingga Nugraha dan Binsar Jon Vic, 2025, “Urgensi Penerapan *Insolvensi Test* dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Jurnal Retentum*, Vol. 07, No. 01.
- Medika Andarika Adati 2018, ”Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat dipidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “ *Jurnal Lex Privatum*, Vol.6.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>.
- M. Faisal Rahendra Lubis, dan Faisal Rahendra, 2018, "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 17, No. 2.
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/350>.
- Muhammad Sheva Alfajri, 2025, “Peran Kurator dalam proses penanganan perkara Kepailitan Perseoraan Terbatas “, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nico Theo Kurniawan, 2024, “Analisa Yuridis akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Memperoleh Putusan Pailit (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn), *Skripsi*, Fakultas Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Rafi Muhammad Ave, 2025, “Konvensi utang Perseroan Terbatas menjadi saham ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Rizal Syah Nyaman, dan Cokorda istri Dian Laksmi Dewi, 2023, “Prosedur Hukum Permohonan Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 05, No. 02.

Rony Malemta Ginting, 2022, “Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Jual-Beli Rumah Secara Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Perum-Perumas Terhadap Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Tasya Nurul Huda, 2021, “Aspek Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kondisi Force Majeure Pada Sengketa Hutang Piutang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Vita Kusuma Dewi, Yuhelson, dan Bernanrd Nainggolan, 2023, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan PKPU terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol. 22, No. 02.

Yasser Arafat, 2024, “Tinjauan Hukum Terhadap Syarat Kepailitan Perseroan Terbatas Di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar.

Yuke Prasetya, 2019, “Analisis Yuridis terhadap tanggung jawab Direksi Perseoraan Terbatas ketika terjadi Kepailitan menurut Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoraan Terbatas”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, Sumatera Utara.

D.Internet

BP Lawyers, Penjelasan Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih Serta Pembuktiann Sederhana dalam Kepailitan, diakses pada tanggal 16 April 2026, <https://bplawyers.co.id/2022/01/04/penjelasan-utang-yang-telah-jatuh-tempo-dan-dapat-ditagih-serta-pembuktian-sederhana-dalam-kepailitan/>.

Dini, *Prosedur Kepailitan di Indonesia Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU*, Best Legal, diakses pada tanggal 21 Februari 2026, <https://bestlegal.id/prosedur-kepailitan-di-indonesia-berdasarkan-uu-kepailitan-dan-pkpu/>.

EAP Partners, *Apa Konsekuensi Jika Tergugat tidak dapat Hadir dalam Persidangan*, diakses pada 21 Februari 2026., <https://www.eap-partners.com/blog/apa-konsekuensi-jika-tergugat-tidak-hadir-pada-persidangan>.

Idik Saeful Bahri, *Mengenal Perbedaan Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam Putusan Hakim*, diakses pada 18 Februari 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-perbedaan-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta-03q>.

Kalmanjunior, Wilsovereenstemming Pengertian dan Relevansinya dalam Hukum, Diakses pada tanggal 3 Maret 2026. “<https://pekerja.com/info/wilsovereenstemming-pengertian-dan-relevansinya-dalam-hukum/>”.